

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN**

2017 - 2019

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

Justin Nurrahma

NIM. 07011381722137

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

Juli 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
2017-2019**

SKRIPSI

Oleh :

**JUSTIN NURRAHMA
07011381722137**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2021

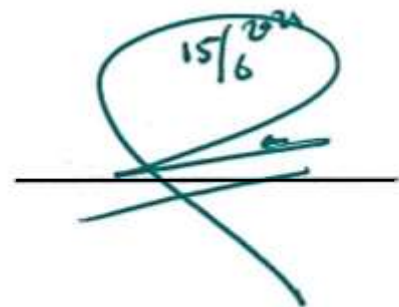
Pembimbing I

**Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
197705122003121003**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

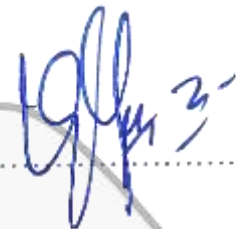
Skripsi dengan judul “Kinerja Pengelolaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017– 2019” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Juli 2021

Palembang, 14 Juli 2021

Ketua :

Dr. Nengyanti, M.Hum

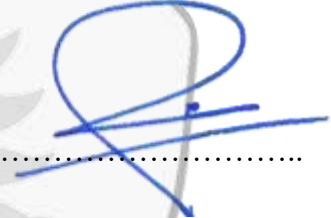
NIP. 196704121992032002



Anggota:

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003



2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM

NIP. 195811191985031003



3. Dwi Mirani, S.IP., M.Si

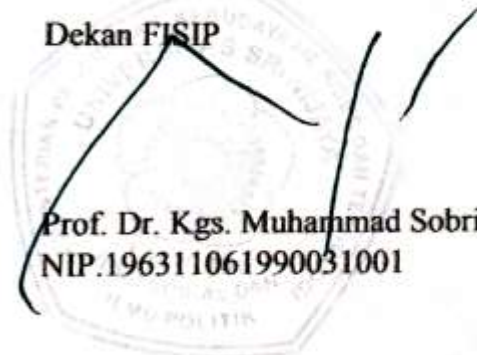
NIP. 198106082008122002



Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Tawakkul is having complete trust that Allah’s plan is the best plan”

- *Yasmin Mogahed*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Kedua Orang Tua tercinta*
 - *Saudari - saudari ku*
- *Sahabat – sahabatku yang selalu memberi support*
- *Teman – teman seperjuangan Administrasi Publik 2017*
 - *Almamater Kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2019*."

Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. ALLAH Subhanahu Wa Ta'alla, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah Burhani dan Ibu Lismini terima kasih atas do'a, bantuan, dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini terutama saat penulis menjalankan perkuliahan. Serta Ayuk Nurcheni Astara dan Adik Raisa Marini yang selalu memberikan serta doa dan dukungan selama penulis menjalankan perkuliahan.
3. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang telah

memberikan ilmu dan bantuan dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.

5. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, masukan, nasihat, serta ilmu yang sangat berguna untuk penulis dalam melaksanakan penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku dosen penguji skripsi, serta Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si dan Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si selaku dosen pembahas pada seminar proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membahas serta memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan.
8. Bapak Abdul Roni, S.E., M.Si, Mbak Fitri Maharani, Mbak Mouna, Bapak Riyatno, S.E, M.Ak, dan Mbak Rizka, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data serta seluruh staf dan pegawai DPPPA dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan. Serta staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis selama menjalankan perkuliahan.
10. Teman – teman yang selalu membantu dan mendukung penulis dari jauh Erina, Ayul, dan Indaw.

11. Teman – teman terbaik penulis di FISIP Oka, Kintan, Indira, Togu, Rahma, Risma, Hera, Lutfi, Widiya, Fia, Vina, Erina, Farah, dan Desi yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaiki kesalahan penulisan untuk kedepannya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2021

Penulis,


Justin Nurrahma

ABSTRAK

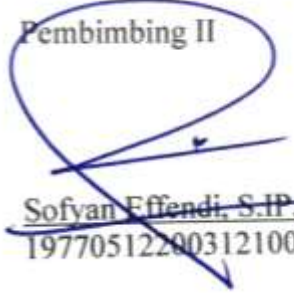
Penelitian ini dilatarbelakangi realisasi anggaran belum mencapai target anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu terjadinya perubahan kepemimpinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 memungkinkan adanya inovasi – inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan pengorganisasian anggaran daerah untuk meningkatkan tata kelola anggaran, sehingga perlu diketahui bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pada dinas tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian statistik deskriptif dengan metode penelitian campuran. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori rasio pengukuran kinerja menurut Mahmudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2019 pada analisis keserasian belanja terjadinya ketidakserasian belanja operasi, belanja modal, dan belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera. Pada analisis pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan positif dengan rata – rata 0,15% pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku pada tahun anggaran yang bersangkutan dan persentase efisiensi belanja 91,65% yang berarti dinas telah melakukan efisiensi meskipun masuk pada kategori kurang efisien. Peneliti menyarankan agar DPPPA Sumsel meningkatkan alokasi belanja kegiatan agar mencapai keserasian belanja, meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan, dan menekankan komitmen pada pejabat pengguna anggaran agar meningkatkan kualitas dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Kata Kunci: Anggaran, Kinerja Pengelolaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembimbing I


Dr. Nengvanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
197705122003121003

Palembang, Juli 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is by the realization of budget that has not reached the budget target at Women's Empowerment and Child Protection Office in South Sumatra. Besides that, there was a change in leadership in South Sumatra in 2019 that probably there are some innovation that can cause the system and organization of local budgets change to improve budget governance, so it is necessary to know how the performance of budget management in the agency. Type of this research is descriptive statistical research with mixture research methods. The types of data that used, in this research are primary data and secondary data, and data collection techniques were carried out by documentation and interview methods. This research used performance measurement ratios theory by Mahmudi. Results of the research shows that the performance of the Women's Empowerment and Child Protection's Departement in South Sumatra budget managemant 2017 – 2019 in Expenditure compatibility analysis on the occurrence of discrepancies in operating expenditures, capital expenditures, and direct and indirect expenditure to the total expenditure at the Women's Empowerment and Child Protection Departement in South Sumatera. Spending growth analysis has a positive growth with an average of 0.15%. This growth is influenced by policies that used in the relevant fiscal year and the percentage of efficiency spending about 91.65%, which means the office has made efficiency even though it is included in the less efficient category. Researchers suggest that the Women's Empowerment and Child Protection Departement in South Sumatera increase the allocation expenditure activities in order to achieve shopping harmony, improve coordination between parties who are directly involved in each activity, and emphasize commitment to officials budget users in order to improve the quality of budget use and budget accountability.

Keywords: Budget, Management Performance, Women's Empowerment and Child protection Departement

Advisor I


Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002

Advisor II


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
197705122003121003

Palembang, July 2021
Head of the Department of Public Administration
faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landaan Teori	12
1. Keuangan Negara	12
2. Pengelolaan Anggaran.....	13
3. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	16
4. Teori Pengukuran Kinerja Berbasis Anggaran.....	18
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Definisi Kosep	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Informan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Sistematika Penulisan	38

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	40
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	41
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	43
4. Tugas Pokok dan Fungsi	46
5. Program/ Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2019	71
B. Hasil dan Pembahasan	71
1. Analisis Keserasian Belanja	71
2. Analisis Pertumbuhan Total Belanja	78
3. Rasio Efisiensi Belanja	80
4. Hasil	86
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2019.....	6
Tabel 2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 5 Fokus Penelitian	35
Tabel 6 Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	72
Tabel 7 Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja	74
Tabel 8 Keserasian Belanja Langsung Terhadap Total Belanja.....	75
Tabel 9 Keserasian Tidak Belanja Langsung Terhadap Total Belanja	76
Tabel 10 Analisis Pertumbuhan Total Belanja	78
Tabel 11 Rasio Efisiensi Belanja.....	80
Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	83
Tabel 13 Hasil.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	45
Gambar 3 Rekonsiliasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	82
Gambar 4 Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	97
Lampiran 2 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi	98
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 1	99
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	100
Lampiran 5 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 1	101
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 2	102
Lampiran 7 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembahas 1	103
Lampiran 8 Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembahas 2	104
Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	105
Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2.....	106
Lampiran 11 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Pembimbing 1	107
Lampiran 12 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Penguji 2.....	108
Lampiran 13 Surat Penelitian	109
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pemberdayaan perempuan memiliki tujuan untuk meningkatkan status dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dengan laki – laki. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilandaskan pada pasal 27 Undang – Undang Dasar 1945 dan diperkuat ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW = *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) ke dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 terutama pada bidang : pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan hukum serta landasan aksi. Deklarasi Beijing hasil konvensi dunia tentang perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995 yang menekankan pada 12 area kritis untuk perempuan yaitu : perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan latihan untuk perempuan, perempuan dan kesehatan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan pengambilan keputusan mekanisme kelembagaan, hak – hak asasi perempuan, perempuan dan media, serta masalah anak perempuan. Maka, untuk mempertegas pelaksanaannya di Indonesia terbitlah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari pembangunan berkelanjutan atau *Millenium Development Goals (MDG's)* 2000 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan sebagai agenda lanjutannya yaitu *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesetaraan gender.

Mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam tujuan nomor 5 *SDG's*, kesetaraan gender ini dapat diwujudkan

di Provinsi Sumatera selatan dengan mengakhiri segala bentuk deskriminasi pada perempuan, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, memastikan bahwa perempuan memiliki partisipasi dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta memberikan hak yang sama bagi perempuan sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional melalui kegiatan – kegiatan yang diselesnggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perempuan sangat strategis, baik karena perannya yang tak tergantikan sebagai ibu maupun jumlahnya yang hampir setengah dari penduduk Sumatera Selatan. Penduduk Sumsel pada tahun 2018 sebesar sekitar 8.391.500 dengan proporsi penduduk laki – laki sebanyak 4.257.100 atau 50,73%, sedang perempuan sebanyak 4.134.400 atau 49,27% (Proyeksi Penduduk BPS). Perempuan merupakan sumber daya pembangunan yang potensial. Pendekatan pembangunan yang belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Bentuk – bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) dapat menimbulkan permasalahan gender (*Gender Issue*).

Sesuai dengan dinamika yang terjadi tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah dipandang perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki wewenang dalam mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan

pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masuk ke dalam urusan wajib non pelayanan dasar, yang artinya disetiap daerah atau provinsi/ kabupaten/ kota urusan ini wajib dilaksanakan baik boleh organisasi perangkat daerah tersendiri atau bergabung dengan urusan lain yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kesetaraan gender sering kali disalah artikan dengan harus samanya hak ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perempuan dan laki – laki. Padahal kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di semua bidang sesuai dengan koadratnya. Sementara, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki – laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Seringkali terjadi diskriminasi gender yang merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial yang lebih banyak dialami oleh perempuan, yang membuat pihak perempuan membutuhkan perlindungan khusus atas hak – haknya. Selain itu, belum optimalnya kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, seperti keterwakilan perempuan dalam palemen, sumbangan pendapatan perempuan, dan

permasalahan yang disebabkan faktor lain seperti nilai – nilai sosial upaya masyarakat yang belum optimalnya akses partisipasi, control, dan manfaat perempuan dalam pembangunan.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan dengan dihilangkannya diskriminasi antara perempuan dan laki – laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Peningkatan kualitas hidup perempuan harus dilakukan di berbagai aspek, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik sosial dan budaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan penyelenggara urusan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai program yang dijalankan yaitu Program pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi Keluarga miskin, Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak Program Penguatan Kualitas Keluarga, Program Peningkatan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Program peningkatan perlindungan khusus anak, Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan perundang – undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan dan keperluan daerahnya masing – masing. Masing – masing daerah sudah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian,

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola anggarannya secara efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber – sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik (Anggara, 2012).

Dimock dan Dimock (1992 : 20) dalam Anggara (2012) mengemukakan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan – persoalan yang ada di masyarakat (Thoha, 1984).

Kinerja dalam pengelolaan anggaran termasuk hal penting dalam administrasi negara, dimana administrasi negara merupakan proses pengorganisasian sumber daya termasuk sumber daya anggaran yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjawab persoalan yang ada dimasyarakat melalui kebijakan dan program kerja pemerintah.

Anggaran menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan serta keberhasilan visi dan misi dari suatu instansi pemerintahan, pengelolaan anggaran yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program yang baik sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Anggaran (*budget*) ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu (Suparmoko, 2011). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses

politik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Menurut (Mardiasmo, 2009), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua jenis yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari – hari dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan anggaran modal adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran menjadi acuan dalam melaksanakan program kerja, serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program, termasuk program pembangunan pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan.

Pada penelitian ini pembangunan pemberdayaan perempuan diteliti melalui kinerja pengelolaan anggaran pada program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Berikut penulis lampirkan anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2019.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2019

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggran	Sisa Anggaran
		Total	
2017	7.041.028.000	6.744.800.916	296.227.084
2018	9.594.095.000	8.626.782.317	967.312.683
2019	11.103.654.170	10.021.037.882	1.082.616.290

Sumber : Rensra DPPP 2019-2023 dan LKJIP 2019

Dilihat dari tabel 1 yang telah penulis tampilkan diatas terdapat beberapa latar belakang masalah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti mengenai Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Pertama adalah Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017, 2018 , dan 2019 masih kurang maksimal dalam realisasi anggaran. Selain itu, terjadinya perubahan kepemimpinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 memungkinkan adanya inovasi – inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan pengorganisasian anggaran daerah untuk meningkatkan tata Kelola anggaran, agar tercapainya penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa Program kegiatan. Berikut program dan realisasi anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019:

Tabel 2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.452.960.000	100,00	1.373.043.276	94,50
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.248.170	100,00	208.625.040	97.38
No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)

3.	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.900.000	100,00	116.113.516	96,04
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000	100,00	76.236.100	95,30
5.	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	35.000.000	100,00	33.154.000	94,73
6.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	32.200.000	100,00	31.188.000	96,86
7.	Program Peningkatan Perlindungan Kusus Anak	269.660.000	100,00	256.209.000	95,01
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.677.080.000	100,00	1.489.449.766	88,81
9.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	150.000.000	100,00	143.517.050	95,68
10.	Program Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	75.000.000	100,00	72.808.300	97,08
11.	Program Penguatan Kualitas Keluarga	300.000.000	100,00	272.300.000	90,77

Sumber : LKJIP DPPPA Provinsi Sumsel 2019

Kedua, dilihat dari tabel 2, program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 ini, realisasi anggaran belum mencapai target anggaran. Adanya sisa anggaran di setiap kegiatan, pemerintah perlu lebih memperhatikan apa – apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh instansi dalam melaksanakan program kegiatan, agar tidak terjadi pemborosan anggaran pada instansi tersebut. Maka dari itu perlu diketahui kinerja pengelolaan anggaran, agar dapat diketahui bagaimana penggunaan anggaran pada dinas terkait dan faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan anggaran pada dinas terkait.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan kinerja pengelolaan anggaran, yaitu yang pertama, Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung Periode 2015 – 2017, hasil penelitian ini adalah pertama, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis varian belanja periode 2015- 2017 dari 30 Kecamatan di Kota Bandung terdapat selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang bersaldo negatif, hal ini berarti bahwa dari 30 Kecamatan di Kota Bandung belum 100% dalam menyerap anggaran PIPPK. Kedua, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa periode 2015-2017 anggaran belanja PIPPK di Kota Bandung sebesar 60% anggaran digunakan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan 40% anggaran digunakan untuk belanja operasional seperti penguatan organisasi, pembuatan seragam, dan lain - lain. Ketiga, kinerja pengelolaan anggaran PIPPK berdasarkan rasio efisiensi belanja periode 2015-2017 presentase efisiensi anggaran diatas 80 sampai dengan 90% dan hal tersebut bisa dikatakan efisien dalam pennggunaan anggaran PIPPK.

Penelitian mengenai kinerja pengelolaan anggaran selanjutnya penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik; (2) analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi realisasinya. Namun, terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak langsung. Secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik.

Selanjutnya, penelitian mengenai kinerja pengelolaan anggaran yang ketiga yaitu Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan kabupaten Lahat tahun 2015-2017, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2015 sampai dengan 2017 yang dilihat dari indikator analisis rasio pertumbuhan belanja dan analisis belanja sudah baik. Sementara jika dilihat dari indikator analisis keserasian belanja belum baik. Penelitian ini merekomendasikan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat harus meningkatkan nilai belanja operasi dan belanja langsung sehingga dapat terjadi keserasian diantaranya

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Analisis Kinerja pengelolaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 - 2019. Hal ini dikarenakan, dengan analisis kinerja dapat mengetahui bagaimana alokasi anggaran belanja yang sebenarnya sehingga dapat mengetahui apakah penyebab terjadinya anggaran yang selalu meningkat di setiap tahunnya meskipun pada tahun sebelumnya masih terdapat sisa anggaran, serta penyebab penggunaan anggaran yang tidak mencapai target anggaran, dan dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberi sumbangsih pemikiran bagi ilmu administrasi publik mengenai pengelolaan keuangan daerah pada program/kegiatan di instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran, dan penggunaan anggaran belanja agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, O. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- AULIYA, F. P. (2018). *KINERJA ANGGARAN DINAS PERPUSTAKAANKABUPATEN LAHATTAHUN 2015-2017*. Universitas Sriwijaya.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Selemba Empat.
- Irawanti. (2018). *Analisis kinerja pengelolaan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung periode 2015-2017* [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati].
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/15867>
- Lantowa, F. D., Machmud, J., & Gorontalo, U. M. (2014). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA*. 9(1), 33–43.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2007). *Balanced Scorecard*. Selemba Empat.
- Mustika, N. A. (2019). *Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2013-2017*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
<https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>

- Nusarifa Tantri, S., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/jati.010103>
- Puspitasari, A. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/106554/>
- Ramadani, Rani Febria dan Lau, E. A. (2015). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Renaldo, Y. R. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* [Universitas Teknologi Yogyakarta]. eprints.uty.ac.id
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. FEB UGM.
- Thoha, M. (1984). *Dimensi - Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. FISIPOL UGM.

Undang - Undang

- LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jurnal

- Agustina, O. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Lantowa, F. D., Machmud, J., & Gorontalo, U. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. 9(1), 33–43.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
<https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Nusarifa Tantri, S., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/jati.010103>
- Ramadani, Rani Febria dan Lau, E. A. (2015). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2014. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Skripsi

- Auliya, F. P. (2018). *Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaankabupaten Lahattahun 2015-2017*. Universitas Sriwijaya.
- Irawanti. (2018). *Analisis kinerja pengelolaan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung periode 2015-2017* [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati].
<http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/15867>
- Mustika, N. A. (2019). *Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2013-2017*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Puspitasari, A. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011* [Universitas Brawijaya].
<http://repository.ub.ac.id/106554/>

Renaldo, Y. R. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* [Universitas Teknologi Yogyakarta]. eprints.uty.ac.id

Internet

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>) Diakses pada 14 September 202